





**POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik**

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/politeia>

# Fungsi Lembaga Riset sebagai Referensi Elektabilitas Politik : Studi Data Hasil PEMILU 2019 di DAPIL II Jawa Barat DPR-RI dan Lembaga Survei Yayasan Polsight Indonesia

Salwa Nazhira <sup>\*1</sup> , Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D.<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup>Padjadjaran University, Jatinangor, 45363, Indonesia

\*Corresponding Author: [salwa20002@mail.unpad.ac.id](mailto:salwa20002@mail.unpad.ac.id)

---

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 16 September 2023

Revised 28 June 2024

Accepted 26 July 2024

Available online 30 July 2024

E-ISSN: 0216-9290

---

## How to cite:

Nazhira, S. & Rahmatunnisa, M. (2024). Fungsi Lembaga Riset sebagai Referensi Elektabilitas Politik : Studi Data Hasil PEMILU 2019 DAPIL II Jawa Barat DPR-RI dan Lembaga Survei Yayasan Polsight Indonesia. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (2), 100-107.

---

## ABSTRACT

Research institutions in Indonesia are currently mushrooming according to the needs of many developing sectors, one of which is the political sector in which there are many dynamics that can be calculated and calculated with numbers or not. For things that can be calculated, research institutions can be used as a method to find out political dynamics and phenomena, where this can be used as a reference and prediction regarding a political situation in the future, one of which is in terms of measuring political electability by either an individual or an institution. In this case, research institutions have a very important role in producing information about political electability accompanied by data and facts that occur in the field so that it can be said that research institutions can provide objective and factual references. One of the data that can be used as a reference for electability is voter data from a candidate or political party in an electoral district.

**Keyword:** Research institute, political electability, candidate, political parties, constituency.

---

## ABSTRAK

Lembaga riset di Indonesia saat ini tumbuh menjamur menyesuaikan dengan kebutuhan banyak sektor yang berkembang salah satunya adalah sektor politik yang didalamnya terdapat banyak dinamika baik yang dapat diperhitungkan dan dihitung dengan angka maupun tidak. Untuk hal-hal yang dapat diperhitungkan, lembaga riset dapat dijadikan sebagai suatu metode untuk mengetahui dinamika dan fenomena politik, dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan prediksi mengenai suatu keadaan politik di waktu yang akan datang salah satunya adalah dalam hal pengukuran elektabilitas politik yang dimiliki oleh suatu pihak baik individu maupun lembaga. Dalam hal ini, lembaga riset memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan informasi mengenai elektabilitas politik yang disertai data-data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga riset dapat memberikan referensi yang objektif dan faktual. Salah satu data yang dapat dijadikan referensi elektabilitas adalah data pemilih dari suatu kandidat atau partai politik di suatu daerah pemilihan (dapil).

**Kata Kunci:** Lembaga riset, elektabilitas politik, kandidat, partai politik, daerah pemilihan (dapil)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

## 1. Pendahuluan

Dalam konteks demokrasi modern, pertimbangan pemilih dalam menentukan kandidat yang akan dipilihnya seringkali dipengaruhi oleh tingkat kualitas dan kredibilitas calon kandidat dan partai politik tersebut. Namun, untuk mengetahui tingkat kualitas dan kredibilitas calon kandidat dan partai politik pemilih tentu saja tidak bisa hanya melalui wacana dan kabar yang beredar. Maka, dalam rangka memfasilitasi, terdapat sebuah lembaga yakni lembaga riset. Lembaga riset merupakan sebuah lembaga yang strategis dalam hal memprediksi elektabilitas politik. Hal ini karena sifat dari riset yang membuka kesempatan dengan besar kepada seluruh masyarakat tanpa syarat yang berarti riset memberikan hak kepada masyarakat secara keseluruhan yang terpilih menjadi responden dalam menilai dan memandang suatu objek politik yang berarti riset merepresentasikan opini publik. (Faizaliskandiar, 1994) mengemukakan bahwa dalam proses survey, individu memiliki posisi yang setara ketika terpilih menjadi responden dan diperlakukan secara anonim sehingga status sosial dan ekonomi yang dimiliki bukan lagi menjadi hal yang penting.<sup>1</sup> Keberadaan lembaga riset di masa reformasi dan dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali memiliki fungsi utama dalam memetakan kekuatan dan elektabilitas para kandidat dan partai politik yang berkontestasi dan dalam pandangan para calon kandidat dan partai politik, keberadaan lembaga riset dapat dijadikan sebagai sebuah media yang memetakan kekuatan dan peluang untuk terpilih. Riset elektabilitas politik ini dapat dilakukan melalui survei sebelum pemilihan (*pra election*), saat berlangsungnya pemilihan (*on election*), dan setelah digelarnya pemilihan (*quick count* dan *exit poll*).

Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sendiri, untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat (dapil Jabar) terdapat total 11 dapil. Salah satunya adalah daerah pemilihan (dapil) II Provinsi Jawa Barat DPR RI yakni daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pada pemilihan umum tahun 2019, terdapat sejumlah 2.962.309 pemilih dengan jumlah suara sah sebanyak 2.816.732. Dari jumlah tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya di Dapil II Provinsi Jabar DPR RI sangatlah banyak. Hanya berbeda sedikit dengan jumlah pemilih yang seharusnya. Di balik jumlah pemilih tersebut terdapat perolehan suara yang didapatkan oleh setiap partai politik peserta pemilu yang ada di dapil disertai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat yang memenangkan kursi di DPR RI, dimana untuk Dapil II Provinsi Jabar DPR RI ini memiliki jatah sebanyak 10 kursi DPR RI. Data mengenai suara partai dan suara kandidat yang berhasil mendapatkan kursi DPR RI ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk pemilihan umum selanjutnya yang akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2024 mendatang. Acuan dan referensi yang dimaksud adalah acuan dan referensi bagi para calon pemilih untuk dapat mempertimbangkan kandidat dan partai politik mana yang akan mereka pilih dan yang mereka anggap akan menjadi wakil yang menurut mereka pantas untuk menduduki jabatan. Untuk para kandidat dan partai politik juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai acuan pembaca peluang mereka untuk dapat terpilih.

## 2. Metode Penelitian

Dalam hal metode penelitian, penyelesaian jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penulis melakukan langkah-langkah dari awal penelitian hingga proses analisis data di mana hal ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek studi dengan berbekal teori yang sudah direncanakan. Karena dalam proses penelitian peneliti langsung melakukan pengamatan secara langsung pada objek studi, maka data yang didapatkan dari hasil penelitian adalah data primer yang merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan dokumentasi dan juga penyerahan berkas-berkas data. Selain itu, peneliti juga melakukan sebuah wawancara terhadap individu yang memiliki peran dalam objek studi agar data yang didapatkan secara tertulis penjelasannya dapat diterima dengan baik secara langsung melalui narasumber.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil

#### 1. Elektabilitas Politik

Dalam pengertiannya, elektabilitas adalah tingkat terpilihnya suatu kandidat dan partai politik peserta pemilu yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas yang dimiliki oleh calon pemimpin sangat penting untuk melihat sejauh mana peluang kandidat dan partai politik untuk terpilih dan dapat memimpin. Semakin tinggi elektabilitas kandidat dan partai politik, maka semakin besar pula peluang yang dimiliki oleh kandidat dan partai politik untuk memenangkan suara terbanyak dalam sebuah pemilihan umum. Tingkat elektabilitas politik penting untuk

<sup>1</sup> Putri, D. T. (2020). PENGARUH HASIL POLLING TERHADAP PEMBENTUKAN OPINI PEMILIH PEMULA. *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, September 2020*, 96-128.

diketahui terutama oleh para kandidat peserta pemilihan umum yang biasanya diukur melalui riset yang didalamnya melakukan survey. Maka, lembaga riset harus bersifat independen. Elektabilitas seorang kandidat dapat meningkat dengan digelarnya kampanye yang didalamnya membahas mengenai visi-misi dan program kerja yang dimiliki oleh kandidat ketika mereka terpilih. Kenapa kampanye? Karena perilaku dan preferensi pemilih memiliki kaitan yang erat dengan faktor apa yang menyebabkan pemilih memilih suatu kandidat. Hal ini juga bersinggungan dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan psikologis yakni perasaan kedekatan yang dimiliki oleh pemilih terhadap kandidat baik individu maupun partai politik yang didukung oleh informasi yang memadai yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga pemilih yakin bahwa kandidat yang akan dipilihnya dapat memperbaiki keadaan (Mujani, Liddle & Ambardi, 2012). Dalam pendekatan rasional, (Downs, 1957) mengemukakan bahwa terdapat orientasi yang menyebabkan pemilih memilih seorang calon kandidat dan sebuah partai politik yakni orientasi terhadap isu yang berkaitan dengan pemecahan masalah di tengah masyarakat tanpa memandang berasal dari partai atau pihak mana kandidat tersebut, yang berarti orientasi nya dalam hal ini murni dalam prinsip perubahan.

Di tahun 2019 lalu, pemilihan umum di Indonesia menjadi sebuah pemilihan umum yang mencetak sejarah baru. Hal ini karena pemilu periode 2019 ini merupakan pemilu serentak yang pertama kali diselenggarakan dengan jumlah pemilih sebanyak 193 juta orang, dimana jumlah ini bertambah dibandingkan dengan pemilihan umum periode tahun 2014 lalu yang berjumlah 2,4 juta pemilih. Ketika hal ini dikaitkan dengan sistem negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kenaikan jumlah pemilih ini mencerminkan bahwa meningkatnya kesadaran demokrasi masyarakat Indonesia antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019. Dengan adanya peningkatan indeks demokrasi melalui kenaikan jumlah pemilih, elektabilitas dari para calon kandidat dan juga partai politik peserta pemilu tentu saja menjadi suatu pertimbangan penting baik bagi pemilih maupun bagi kandidat dan partai politik peserta pemilu. Elektabilitas politik ini menjadi sebuah dasar dan pertimbangan dari kepercayaan dan alasan mengapa pemilih harus memilih suatu pihak.

## 2. Riset Politik

Pada awalnya, riset banyak digunakan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi pada masa akhir Perang Dunia ke-II. Kemunculan kegiatan riset ini dilatarbelakangi oleh kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kegiatan survey baik kesalahan dari metodologi maupun kesalahan dari pelaksanaan di lapangan, dimana hal ini terjadi karena belum terjadi kesesuaian antara metodologi yang digunakan dengan hasil riset yang didapatkan. Teknik riset yang digunakan juga hendaknya harus menggunakan batasan data yang jelas serta didalamnya ada kegiatan penyelidikan dan peninjauan. Seiring terjadinya perkembangan, ilmu mengenai metodologi riset terutama riset yang didalamnya terdapat metode survey juga berkembang dan memiliki banyak jenis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Riset dapat dilakukan oleh pihak-pihak di bidang apapun salah satunya adalah bidang politik. Riset politik ditunjang oleh perkembangan ilmu terapan politik, pemahaman perilaku politik yang pada umumnya mengarah kepada perilaku pemilih, serta analisis mengenai hubungan antara politik dengan bidang lain.

Saat ini, lembaga riset di Indonesia tumbuh menjamur dan umumnya terlihat seperti konsultan politik untuk para individu yang akan memasuki arena politik dan menduduki sebuah jabatan didalamnya baik dalam konteks individu maupun untuk kepentingan lembaga seperti partai politik. Lembaga riset memiliki kewenangan untuk melihat tingkat simpati publik terutama menjelang pemilihan umum. Lebih jauh, lembaga riset juga memiliki wewenang untuk melakukan quick count setelah resmi digelarnya pemilihan umum. Wewenang yang dimiliki oleh lembaga riset secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang berisi izin kegiatan riset dengan metode survey dengan syarat hasil survey tersebut diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam konteks pemilihan umum (pemilu) sendiri, kegiatan riset atau jajak pendapat secara legal diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 701 Tahun 2003, Pasal 14 Ayat (1) dengan syarat menyertakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metodologi yang digunakan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2004, Pasal 20 Ayat (8) yang membahas tentang jajak pendapat umum mengenai pasangan calon (paslon) yang menjadi peserta pemilu yang pada intinya jajak pendapat harus menyertakan nama sponsor, rumusan pertanyaan, teknik pengumpulan data yang digunakan, waktu pelaksanaan, dan keterangan mengenai sampel yang diambil.

Kualitas data yang dihasilkan dari sebuah kegiatan riset politik yang meliputi tingkat validitas dan tingkat presisi hasil ditentukan oleh metodologi dan juga mekanisme kontrol periodik terhadap metodologi yang digunakan. Dalam hal ini berarti sifat metodologi yang digunakan harus sesuai dengan data apa yang akan dicari dan diteliti serta keberhasilan pengoperasian yang dilakukan oleh pihak periset terhadap metodologi yang digunakan. Yang menjadi sebuah sentral dari keberadaan

lembaga riset politik adalah mengenai perannya dalam merilis hasil survei berupa quick count yang dapat mempengaruhi tingkat simpati publik terhadap tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga dengan hasil quick count tertentu. Hasil riset politik yang dikeluarkan oleh lembaga survey dapat membuat publik sebagai pihak pemilih untuk lebih memilih tokoh yang unggul berdasarkan hasil survey. Output dari kegiatan riset politik yang dilakukan oleh lembaga riset dapat dijadikan sebagai sebuah petunjuk dalam menentukan strategi apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh para kandidat. Maka pada dasarnya, hasil riset politik terutama yang didalamnya memuat tingkat elektabilitas dapat menjadi sebuah hal yang mempengaruhi perilaku politik pemilih dan juga sebuah hal yang mendorong kandidat untuk mengatur strategi agar mereka dapat terpilih.

### 3. Lembaga Riset Yayasan Polsight Indonesia

Sejak berakhirnya masa orde baru, lembaga riset mulai bangkit kembali dan berkembang pesat hingga saat ini. Bangkitnya pendirian lembaga survei dapat dilihat dari keadaan menjelang pemilu tahun 1999 terdapat banyak lembaga survey yang muncul seperti LP3ES, RPC, IFES, dan Litbang Kompas yang turut serta dalam jajak pendapat pemilihan umum tahun 1999. Puncaknya terjadi pada saat Pemilu tahun 2004. Lembaga riset semakin menarik terutama dalam fungsi pemetaan kekuatan dan peluang para kandidat yang ikut berkontestasi dalam Pemilu. Selama masa reformasi semakin banyak lembaga riset yang berdiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata setidaknya terdapat sebanyak 56 lembaga riset dan hitung cepat yang terdaftar di database KPU.

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bagian sebelumnya, lembaga riset tumbuh menjamur menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari banyak bidang, salah satunya bidang Ilmu Politik. Lembaga riset yang dapat melakukan survey-survey politik tentu saja lembaga riset politik. Lembaga riset politik saat ini juga tumbuh dengan pesat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah yang berdiri di Kota Bandung. Lembaga riset ini bernama Yayasan Polsight Indonesia. Polsight Indonesia didirikan pada tanggal 19 Januari 2010 dan pada awalnya berdomisili di Kabupaten Sumedang dengan wilayah kerja meliputi seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Didirikan secara sah melalui notaris, Mohamad Juania, S.H., M.Kn. dengan dasar Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia nomor AHU-0440.AH.02.01. Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010. Lembaga riset ini berfokus kepada isu-isu politik empiris di sekitar wilayah Provinsi Jawa Barat baik dari segi demografi, pemerintahan, elektoral, dan kewargaannya. Di tahun ini, lembaga riset Polsight akan mengadakan riset mengenai Studi Psikologi Politik Masyarakat Jawa Barat Pascapandemi COVID-19 pada Pemilu dan Pilkada 2024, dan akan melakukan survey mengenai fenomena Money Politics atau Politik Uang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Beberapa pembiayaan dari kegiatan riset yang dilakukan oleh Polsight dibiayai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Lembaga riset menggunakan dinamika politik yang terjadi sebagai suatu jembatan penghubung antara para calon kandidat, pemerintah, dan masyarakat. Lembaga riset dapat dipandang sebagai pilar demokrasi karena dengan adanya lembaga riset yang dapat menghasilkan sebuah data hasil dari survey yang dilakukan, hal ini akan membawa kekuatan transparansi dan sebagai sebuah media dalam hal mengartikulasikan seseorang yang akan maju menjadi wakil rakyat dalam hal peluang serta lebih jauh lagi lembaga riset politik dapat mengagregasi kebijakan sesuai dengan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat. Dari yang pada awalnya ketertarikan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum hanya dapat ditemukan saat kampanye, dengan adanya lembaga riset politik hal itu menjadi berubah karena lembaga riset politik menghasilkan sebuah prediksi mengenai elektabilitas, popularitas, dan peluang kandidat yang dapat dijadikan sebagai sebuah panduan bagi pemilih mengenai siapa yang layak mereka pilih.

### 4. Metode Riset Lembaga

Riset elektabilitas politik seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, dapat dilakukan melalui survei sebelum pemilihan (pra election), saat berlangsungnya pemilihan (on election), dan setelah digelarnya pemilihan (quick count dan exit poll). Survey sebelum pemilihan (pra election) biasanya dilakukan untuk mengetahui kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi melalui sebuah data, sehingga partai politik dapat mengatur sebuah strategi dalam hal memilih nama kandidat yang akan diusung oleh partai untuk menjadi calon wakil. Untuk survey saat berlangsungnya pemilihan (on election), hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat elektabilitas para kandidat yang nama-namanya sudah diusung oleh partai sehingga dengan cara ini tingkat persaingan kandidat dalam hal elektabilitas dapat diukur. Sedangkan survey yang dilakukan setelah digelarnya pemilihan (quick count dan exit poll) dijadikan sebagai sebuah media kontrol serta media pembantu untuk dilakukannya sebuah mekanisme yakni check and balance terhadap hasil

dari pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilu.

Pada dasarnya, konsep dari sebuah pelaksanaan riset politik yang dilakukan oleh lembaga riset dengan menggunakan metode survey, terdapat dua fenomena yang mempengaruhi sebuah hasil survey yakni bandwagon effect dan underdog effect. Bandwagon effect adalah sebuah fenomena dimana pemilih cenderung akan memberikan hak pilihnya kepada kandidat dan partai politik yang sudah diprediksi akan memenangkan kontestasi Pemilu sehingga dapat dikatakan perilaku pemilih disini dipengaruhi oleh keunggulan kandidat dan partai politik berdasarkan data elektabilitas yang tersedia. Sedangkan fenomena underdog effect adalah sebuah fenomena dimana pemilih cenderung akan memberikan hak pilihnya kepada kandidat dan partai politik yang sudah diprediksi akan kalah dalam sebuah kontestasi Pemilu (Hennessy, 1990).

## 5. Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Barat DPR RI

Pembagian daerah pemilihan (Dapil) nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setiap daerah pemilihan terletak di satu provinsi yang sama, dimana didalamnya mencakup seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi. Di setiap kabupaten dan kota hanya memiliki satu daerah pemilihan sehingga dalam satu daerah pemilihan terdapat lebih dari satu kabupaten dan kota. Setiap distrik mendapatkan wakil sebanyak 3-10 orang. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan daerah pemilihan terbanyak yakni 11 daerah pemilihan. Salah satu daerah pemilihan yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah Daerah Pemilihan II DPR RI yang terdiri dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Daerah pemilihan inilah yang akan dibahas untuk menjadi studi kasus dalam artikel ini.

### A. Pembahasan

Keberadaan lembaga riset politik menjadi sebuah jalan dalam penggambaran peta politik terutama dalam hal pemilu. Hasil dari riset politik dapat digunakan sebagai acuan dasar peta politik pemilu dari pelaksanaan satu periode pemilu, ke pelaksanaan periode pemilu selanjutnya. Salah satu implementasinya adalah hasil riset politik pemilihan umum periode tahun 2019-2024 yang dapat dijadikan sebuah peta politik dan referensi untuk penyelenggaraan pemilihan umum periode tahun 2024-2029. Mengapa penggunaan hasil riset politik sejauh menjadi acuan peta politik dan referensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum? Hal ini karena hasil survey yang dilakukan oleh lembaga riset politik merupakan sebuah produk ilmiah sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya secara penuh oleh publik karena riset politik dilaksanakan dengan metode dan prosedur yang sesuai dan teruji. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan pimpinan lembaga riset politik yang diduduki oleh pihak-pihak yang kredibel di bidang riset terutama riset politik. Selain itu, hasil riset politik dapat memberikan kepercayaan publik terhadap kandidat dan partai politik calon peserta pemilihan umum yang berdasar pada data dan bukti.

Lembaga riset politik melakukan evaluasi kinerja individu dan kandidat partai politik yang sedang menjabat. Kinerja yang dievaluasi dan dijadikan dasar riset adalah mengenai analisis mendalam mengenai kebijakan dalam sudut pandang jenis kebijakan, dampak dan output terhadap masyarakat serta derajat realisasi dari kebijakan tersebut apakah dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas atau tidak. Evaluasi ini dapat membantu pihak pemilih untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yang sudah dibuat sehingga hal ini dapat mempengaruhi elektabilitas kandidat. Selain mengenai evaluasi dan penilaian kinerja, lembaga riset politik dapat melakukan sebuah kegiatan survei opini publik untuk mengetahui tingkat elektabilitas kandidat lebih lanjut karena dalam pelaksanaannya terdapat proses wawancara dengan responden terpilih yang dapat menghasilkan data mengenai preferensi politik responden sebagai pemilih. Selanjutnya, data yang sudah diperoleh dianalisis sebagai bahan dihasilkannya informasi tentang tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat tertentu. Survei opini publik ini dapat menghasilkan sebuah gambaran tentang sejauh mana kandidat mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pemilih sehingga pemilih juga memiliki referensi untuk menentukan pilihan politik mereka. Selain survey opini publik, lembaga riset politik juga dapat melakukan penelitian independen mengenai isu-isu politik lain yang empirik dan relevan. Lembaga mengumpulkan, memperoleh, dan menganalisis data yang biasanya berkaitan dengan isu-isu kebijakan publik, isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memiliki kaitan dengan isu-isu politik. Output dari adanya penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah pemahaman lebih lanjut dan lebih valid mengenai kedudukan politik individu dan partai politik calon kandidat mengenai isu-isu penting tersebut. Dengan adanya referensi yang berasal dari penelitian independen yang dapat dijadikan sebagai sebuah pembandingan oleh pihak pemilih mengenai klaim dan janji politik yang mereka terima dibandingkan dengan fakta-fakta yang tersedia dari informasi yang dihasilkan oleh lembaga riset politik.

Selain itu, lembaga riset politik juga seringkali melakukan kegiatan pengamatan dan pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum beserta proses-proses politik yang lain. Yang dilakukan oleh lembaga riset politik adalah mengawasi jalannya pemilihan umum, melaporkan ketika terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu, menganalisis data hasil pemilihan umum, dan memberikan evaluasi yang bersifat independen mengenai integritas dan transparansi proses politik. Hasil kegiatan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan lembaga riset politik ini dapat membantu pemilih memahami keadilan dan keabsahan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini juga dapat menjadi sebuah motivasi dan acuan bagi para kandidat dan partai politik calon peserta pemilihan umum untuk meningkatkan kesadaran mengenai popularitas dan elektabilitas yang mereka miliki dan bahkan motivasi individu untuk menjadi bagian dari kandidat ketika individu tersebut memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga riset politik.

Dengan adanya survei politik, partai politik dapat memanfaatkan hasilnya dalam proses seleksi kandidat yang namanya akan berpotensi ketika diusung. Baik dalam jabatan eksekutif maupun legislatif. Rekrutmen politik merupakan sebuah taman rahasia dalam area kontestasi politik, dimana partai politik memiliki wewenang penuh untuk menentukan kandidat yang tidak semua pihak memiliki wewenang tersebut. Di beberapa partai politik wewenang ini hanya dimiliki oleh ketua umum, sekretaris jenderal, dan badan pemenangan pemilihan umum di kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gallagher and Marsh's (1988). Dalam hal ini hasil survei dapat memberikan sebuah sistem perekrutan dan pengusungan calon kandidat oleh partai politik secara rasional dan berdasarkan realitas yang ada, bukan hanya berdasarkan kedekatan. Kehadiran lembaga survey politik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 435 sampai 447 di BAB Pemantau Pemilu. Hal ini menandakan bahwa lembaga riset politik membawa dukungan untuk sistem politik di Indonesia terutama dalam hal data, sehingga sistem politik utamanya dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah berbasis data dan ilmiah sehingga lembaga riset politik yang kredibel dan terdaftar sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan yang lebih pentingnya adalah netralitas yang harus dimiliki oleh lembaga riset politik sehingga tidak terjadi keberpihakan terhadap satu kandidat politik.

Di masa reformasi, lembaga riset politik tumbuh menjamur seiring dengan kebutuhan terutama dalam masa-masa menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya adalah lembaga riset politik yang berdiri di Kota Bandung, Yayasan Polsight Indonesia yang didirikan pada tanggal 19 Januari 2010 di Kabupaten Sumedang sehingga pada awalnya berdomisili di Kabupaten Sumedang dengan wilayah kerja meliputi seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Didirikan secara sah melalui notaris, Mohamad Juania, S.H., M.Kn. dengan dasar Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia nomor AHU-0440.AH.02.01. Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010. Lembaga riset ini berfokus kepada isu-isu politik empiris di sekitar wilayah Provinsi Jawa Barat baik dari segi demografi, pemerintahan, elektoral, dan kewargaannya. Di tahun ini, lembaga riset Polsight akan mengadakan riset mengenai Studi Psikologi Politik Masyarakat Jawa Barat Pascapandemi COVID-19 pada Pemilu dan Pilkada 2024, dan akan melakukan survey mengenai fenomena Money Politics atau Politik Uang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Beberapa pembiayaan dari kegiatan riset yang dilakukan oleh Polsight dibiayai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu prosedur dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga riset politik Polsight ini adalah mencari data-data mengenai perolehan suara di suatu daerah pemilihan baik perolehan suara individu maupun perolehan suara partai politik yang keperluan dari pencarian data tersebut adalah untuk digunakan sebagaimana mestinya secara independen. Salah satunya adalah data perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) II Jawa Barat di DPR RI dengan data sebagai berikut:

EKSTING POLITIK DI DAPIL JABAR 2 DPR-RI							
Meliputi Ko/Kab:							
- Kabupaten Bandung							
- Kabupaten Bandung Barat							
Jumlah Kursi : 10							
Jumlah DPT 2019 : 2.962.309							
Jumlah Suara Sah 2019 : 2.816.732							
HASIL PEMILU 2019							
NO	NAMA PARTAI	SUARA PADA 2019	PERSENTASE	JUMLAH KURSI	NAMA ANGGOTA	SUARA PADA 2019	KETERANGAN
1	PKB	235.607	8%	1	Dr. H. CIJUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	108.452	
2	GERINDRA	463.231	16%	2	RACHEL MARIAM SAVIDINA	145.636	
2	PDIP	357.145	13%	1	IIS ROSITA DEWI, S.Hum., M.M	72.125	
3	GOLKAR	433.249	15%	2	H. YALDI SIRMULYADI	74.922	
4	NASDEM	206.603	7%	1	Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si.	122.664	
5	GARUDA	10.787	0%	0	DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si	77.334	
6	BERKARYA	64.845	2%	0	RIAN FERMANSYAH, S.Pd.	35.260	
7	PKS	371.251	13%	1	Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.		
8	PERINDO	87.086	3%	0			
9	PPP	67.332	2%	0			
10	PSI	44.278	2%	0			
11	PAN	144.832	5%	1	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E	38.570	
12	HANURA	17.513	1%	0			
13	DEMOKRAT	365.700	13%	1	Dr. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol	165.182	
14	PBB	39.934	1,42%	0			
15	PKPI	7.139	0,25%	0			
	Jumlah	2.816.732	100%	10			

Gambar 1.3

Sumber: Data Yayasan Polsight Indonesia

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa di daerah pemilihan (Dapil) II Jawa Barat di DPR RI yang terdiri dari dua daerah yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat pada pelaksanaan pemilihan umum periode tahun 2019 terdapat sebanyak 15 partai politik peserta pemilihan umum yang terdiri dari PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI dimana perolehan suara terbanyak diduduki oleh Gerindra sebanyak 463.231 suara, disusul oleh Golkar sebanyak 433.249 suara, dan disusul oleh PKS sebanyak 371.251 suara dari total suara sah sebanyak 2.816.732 suara. Maka, dalam hasil perolehan suara pada Dapil II Jawa Barat DPR RI ini Gerindra memperoleh kursi sebanyak 2 dari 10 kursi yang rata-rata partai politik lain memperoleh sebanyak satu kursi atau bahkan tidak mendapatkan kursi. Terdapat 8 partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR RI yakni Partai Garuda, Berkarya, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI dengan perolehan suara terendah adalah PKPI sebanyak 7.139 suara. Namun perolehan suara partai politik ini berbanding dengan perolehan suara kandidat individu di Dapil II Jawa Barat DPR RI ini. Kandidat individu dengan suara terbanyak diduduki oleh Dr. Dede Yusuf M.E, S.T., M. I.Pol. kandidat dari Fraksi Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 165.182 suara, disusul oleh Rachel Mariam Sayidina kandidat dari Fraksi Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 145.636 suara, dan disusul oleh Ir. H. Anang Susanto, M.Si. dari Fraksi Golkar dengan perolehan suara sebanyak 122.664 suara. Untuk perolehan suara kandidat terendah diperoleh oleh Rian Fermansyah, S.Pd. dari Fraksi Nasdem dengan perolehan suara sebanyak 35.260 suara.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui sebuah tingkat elektabilitas tertinggi yang diperoleh partai Golkar di Dapil II Jawa Barat DPR RI. Dengan elektabilitas partai politik yang tinggi secara otomatis jumlah kursi yang diperoleh akan relatif lebih banyak dibandingkan dengan partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang lebih rendah. Dari 10 kursi yang tersedia di DPR RI untuk Dapil II Jawa Barat, 4 kursi berhasil direbut oleh partai Gerindra dan Golkar dengan perolehan masing-masing sebanyak 2 kursi, lalu untuk partai lain yang memperoleh kursi seperti partai PKB, PDIP, Nasdem, PKS, PAN, dan Demokrat memperoleh sebanyak satu kursi. Data tersebut dapat kita analisis dengan melihat jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat individu dan partai politik pada pemilihan umum periode tahun 2019 yang menunjukkan elektabilitas yang dimiliki oleh kandidat yang maju pada pemilu tahun 2019 yang nantinya oleh lembaga riset politik dijadikan sebuah pertimbangan data untuk menunjukkan elektabilitas dan popularitas para calon kandidat baik individu maupun partai politik yang nantinya hal ini dapat menjadi sebuah acuan peta politik di penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Dengan adanya angka dan data yang valid mengenai elektabilitas ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan terutama bagi pemilih untuk menentukan kandidat mana yang akan mereka pilih meskipun data hasil elektabilitas yang biasanya akan diperoleh melalui survey lembaga politik tidak sepenuhnya menentukan perilaku pemilih namun bagi beberapa pemilih hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mereka menentukan hak pilih yang dimiliki.

Dari segi partai politik dan kandidat sendiri, data elektabilitas yang nantinya akan diolah oleh lembaga riset politik ini dapat dijadikan sebagai sebuah pembaca peluang dan motivasi serta acuan mengenai keadaan jumlah perolehan suara baik dari partai politik maupun individu calon kandidat dan sebagai pendorong untuk memikirkan dan melaksanakan kembali strategi-strategi politik terutama dengan dilaksanakannya kampanye guna menambah ataupun mempertahankan elektabilitas politik yang dimiliki sehingga mereka bisa membaca kemungkinan-kemungkinan dan peluang yang akan dimiliki pada saat pelaksanaan pemilihan umum terutama dalam hal elektabilitas.

#### 4. Kesimpulan

Lembaga riset politik memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai bahan referensi mengenai elektabilitas politik dalam konteks demokrasi. Penilaian kinerja, survei opini publik, penelitian independen, pemantauan dan pengawasan pemilihan umum beserta proses politiknya merupakan fungsi utama dari lembaga riset politik dalam memberikan informasi yang objektif dan berbasis bukti dan data kepada pemilih. Dengan mengacu kepada referensi yang dihasilkan oleh lembaga riset, pemilih dapat membuat keputusan politik yang lebih terinformasi dan cerdas dan lebih jauh akan meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan. Maka dari itu, sudah sangat wajar jika selama masa reformasi terutama ketika tahun-tahun politik, lembaga riset politik tumbuh menjamur di Indonesia salah satunya adalah lembaga riset politik yang berdiri di Kota Bandung, Yayasan Polsight Indonesia yang didirikan pada tanggal 19 Januari 2010 di Kabupaten Sumedang yang memiliki data mengenai hasil perolehan suara partai dan kandidat pada pemilihan umum tahun 2019 di daerah pemilihan (Dapil) II Jawa Barat DPR RI.

Dalam data tersebut tertera mengenai partai dan kandidat mana yang memperoleh suara tertinggi dan terendah yang hasil datanya dapat dijadikan sebagai dasar dari sebuah survei publik dalam melihat perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh data tersebut meskipun tidak bersifat sepenuhnya. Data tersebut dapat dijadikan sebuah acuan dan referensi baik bagi para pemilih untuk menentukan suaranya, baik bagi para kandidat dan partai politik untuk mengatur kembali strategi-strategi politik mereka agar bisa memenangkan kontestasi pemilihan umum di periode selanjutnya yakni pemilihan umum tahun 2024.

#### Daftar Pustaka :

- Durrah, F. I., Anwar, S., & Siregar, L. R. (2020). Markov Chain Analysis, Metode Alternatif dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu melalui Tagar: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 5, No. 1, Maret 2020, 41-57.
- Haniifah, A. (2020). Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi UII*, 45-47.
- Hidayah, A. (2021). *Pentingnya Hasil Survei Jelang Pemilu Tahun 2024*. theindonesianinstitute.com, diakses dari: <https://www.theindonesianinstitute.com/pentingnya-hasil-survei-jelang-pemilu-tahun-2024/>.
- Perludem. (n.d.). *Konversi Suara Menjadi Kursi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)*. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.
- Putri, D. T. (2020). Pengaruh Hasil Polling terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula. *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, September 2020*, 96-128.
- Supit, M., Lopian, M., & Tulung, T. (2022). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow). *Eksekutif Volume 2 No. 1 Tahun 2022*, 1-10.
- Sumber Data Dasar Hukum Berdirinya Lembaga Riset Yayasan Polsight Indonesia : Yayasan Polsight Indonesia
- Sumber Data Eksisting Perolehan Suara Dapil II Jawa Barat DPR RI : Yayasan Polsight Indonesia